**BAB II**

**GLOBALISASI DAN REGIONALISME DI KAWASAN ASEAN MENUJU** **MEA**

Pada bagian ini, pembahasan akan dimulai dari tiga hal yang mendasar yang saling berkaitan, yakni globalisasi, regionalisme di kawasan Asia Tenggara serta pembentukan ASEAN dan integrasi perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara dan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

* 1. **Fenomena Globalisasi**

 Fenomena globalisasi telah mendapatkan perhatian yang sangat besar dari ekonomi politik internasional serta sudah menjadi agenda internasional yang sulit dihindari oleh semua negara di dunia. Para teoritisi globalisasi meyakini bahwa terdapat kecenderungan umum dalam proses-proses universal sekarang ini yang melibatkan interkoneksi dan interdependensi antara negara dengan masyarakat.[[1]](#footnote-1) Cohn mendefenisikan globalisasi sebagai *“a process that* *involves both the broadening and deepening of interdependence among societies and states throughout the world.*”[[2]](#footnote-2) Dalam konteks ini,batas-batas nasional negara bangsa semakin menjadi kurang penting, dan pemahaman tradisional mengenai kedaulatan negara telah dirusak, serta individu dalam suatu kawasan harus dilihat dalam konteks global. Meskipun pada dasarnya tidak terdapat kesepakatan di kalangan pengamat dalam menjelaskan globalisasi, tetapi bahwa globalisasi mempunyai pengaruh besar dalam hampir semua kehidupan ekonomi, politik dan sosial pada abad ini menjadi fakta yang nampaknya tidak dapat dibantah. Dalam hal ini, kaum transformasionalis melihat bahwa globalisasi adalah kekuatan utama di balik perubahan-perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang tengah menentukan kembali masyarakat modern dan tatanan dunia (*world order*).[[3]](#footnote-3)

Globalisasi telah menempatkan kembali fungsi dan kekuasaan pemerintahan nasional. Dalam kaitan ini, negara tidak lagi dapat bersembunyi dibalik klaim kedaulatan nasional. Sebaliknya, kekuasaan negara dalam mengambil keputusan seharusnya disejajarkan dengan lembaga-lembaga *go-vernance* global dan hukum internasional. Oleh karenanya, negara yang mengelola dirinya sendiri dan sebagai unit yang otonom lebih merupakan klaim normatif dibandingkan sebagai suatu pernyataan deskriptif.[[4]](#footnote-4)

Globalisasi atau lebih tepatnya globalisasi neoliberal telah menantang kapasitas ekonomi politik negara.[[5]](#footnote-5) Dalam bidang politik, negara tidak lagi menjadi aktor tunggal meskipun keberadaannya tetap menjadi unit penting dalam ekonomi politik global dewasa ini.[[6]](#footnote-6) Di bidang ekonomi, dampak globalisasi ini berlangsung melalui tiga mekanisme, yakni tekanan perdagangan yang semakin kompetitif, multinasionalisasi produksi, dan integrasi pasar keuangan. *Pertama*, semakin menajamnya kompetisi perdagangan menjadi salah satu bagian penting globalisasi ekonomi, dan ini telah diakui secara umum meskipun, sebenarnya, kompetisi itu tidak hanya dalam perdagangan, tetapi juga dalam memperebutkan investasi. *Kedua*, meluasnya multinasionalisasi produksi, dan berikut ancaman perusahaan-perusahaan multinasional yang dapat memindahkan lokasi produksinya dari satu negara ke negara lain dalam rangka mencari keuntungan terbesar. Implikasi multinasionalisasi terletak pada biaya-biaya produksi dan pemerintahan. Dalam kaitan ini, pemerintahan nasional harus menerapkan kebijakan pasar bebas jika mereka ingin berkompetisi dalam memperebutkan investasi dan penyediaan tenaga kerja yang berdaya saing serta relatif murah dibandingkan dengan kawasan lain. *Ketiga*, dampak globalisasi terhadap ekonomi nasional terletak pada integrasi pasar finansial global.[[7]](#footnote-7)

Integrasi pasar finansial global ini telah mengurangi sedemikian rupa otonomi ekonomi nasional mengingat aliran uang ini tidak dapat dikontrol oleh kekuatan negara manapun. Integrasi ini, pada akhirnya, juga akan melahirkan interkoneksi dan interdependensi sekaligus. Peristiwa, aktivitas, keputusan-keputusan ekonomi dan politik dalam suatu wilayah akan mempunyai dampak yang signifikan terhadap individu di dunia yang mempunyai jarak yang cukup jauh.[[8]](#footnote-8) Pendeknya, dalam pandangan yang optimistis, tidak ada bidang-bidang kehidupan manusia, kelompok, dan juga negara bangsa yang tidak tersentuh oleh akibat-akibat yang ditimbulkan oleh globalisasi.[[9]](#footnote-9)

**B. Regionalisme Menuju Pembentukan ASEAN**

Fenomena globalisasi di satu sisi menjadi dunia semakin kecil dan memungkinkan menjadikan penyatuan wilayah baik dalam arti geografi, ekonomi, politik dan budaya, namun di sisi lain, upaya pengelompokan negara-negara dalam sebuah unit kecil yang bersatu. Kerjasama antar negara-negara yang berada dalam suatu kawasan untuk mencapai tujuan regional bersama adalah salah satu tujuan utama mengemukanya regioanlisme.

Dengan membentuk organisasi regional dan atau menjadi anggota organisasi regional, negara-negara tersebut telah melakukan distribusi kekuasaan diantara mereka untuk mencapai tujuan bersama. Munculnya suatu prioritas baru (peran dunia) dalam bentuk integrasi regional yang dijadikan sebagai dasar pada sebuah paradigma, dimana kepentingan kelompok menjadi yang utama atau dengan perkataan lain, paradigma kepentingan regional yang ada. Pada gilirannya akan memberikan kontribusi bagi kepentingan nasional masing-masing.

Regionalisme merupakan perkembangan integrasi sosial dalam sebuah wilayah yang kerapkali tidak secara langsung dalam interaksi sosial dan ekonomi. Regionalisasi tidak berdasarkan kebijakan yang secara sadar dibuat oleh negara maupun bukan sekumpulan negara dan pola regionalisasi tidak harus berdasarkan batas negara. Sedangkan kesadaran regional dan identitas menekankan pada sense of belonging atau rasa memiliki antar entitas-entitas yang terlibat di dalamnya.[[10]](#footnote-10)

Dalam kaitannya dengan regionalisme, globalisasi akan mendorong regionalisme dalam empat cara. *Pertama*, integrasi yang semakin mendalam menciptakan persoalan-persoalan yang membutuhkan manajemen kolektif, dan lebih spesifik, bentuk-bentuk manajemen dan regulasi yang melibatkan hak prerogatif negara. *Kedua*, karakteristik global dalam banyak isu seringkali dilebih-lebihkan, dan meskipun memang terdapat isu-isu yang bersifat global, tetapi dampaknya lebih sering dirasakan dalam suatu kawasan. *Ketiga*, merepresentasikan suatu keinginan untuk melakukan rekonsiliasi menuju integrasi pasar secara global dan tekanan-tekanan teknologi ke arah globalisasi dan integrasi pada satu sisi, dan pada sisi lain kecenderungan ke arah fragmentasi dalam waktu bersamaan. *Keempat*, integrasi ekonomi global barangkali merupakan stimulus yang paling kuat dalam mendorong regionalisme ekonomi melalui pengintensifan pola-pola kompetisi ekonomi merkantilis.[[11]](#footnote-11)

Dalam hal ini, muncul dan meluasnya regionalisme ekonomi merupakan respon penting negara-negara bangsa untuk menyelesaikan secara bersama-sama masalah-masalah politik dan interdependensi yang tinggi dalam ekonomi global. Dibandingkan dengan regionalisme yang muncul pada era 1950-an dan 1960-an, bentuk-bentuk regionalisme baru ini lebih mempunyai signifikansinya dalam ekonomi global. Ini karena posisinya dengan globalisasi berada dalam dua kondisi, mendukung ke arah integrasi ekonomi global atau sebaliknya mendorong ke arah proteksionisme merkantilis negara-negara anggota.

Pasca perang dinging, neoliberalisme yang bersifat *low politics* mulai berkembang, dimana aspek-aspek seperti ekonomi, budaya lebih mendominasi kerjasama antar Negara. Aspek ekonomi menjadi penting karena menyangkut masalah pemenuhan kebutuhan manusia baik yang primer maupun sekunder. Oleh sebab itu banyak Negara-negara yang saling berkejasama dalam bidang ekonomi sehingga memunculkan kerjasama regionalisme yang berfokus pada bidang ekonomi.

Perbedaan yang mendasar dari regionalisme dan neoregionalisme adalah pertama, regionalisme pada dasarnya merupakan warisan perang dingin dimana regionalisme dibentuk berdasarkan kalkulasi ideologi dan keamanan sebagaimana yang terlihat di Eropa sebelum runtuhnya tembok Berlin. Sedangkan neoregionalisme baru terbentuk berdasarkan struktur interaksi yang lebih bersifat multipolar.

Regionalisme dianggap penting karena merupakan wadah paling tepat dan paling mungkin untuk menerima perubahan dan mengintensifkan resistensi dari tekanan kompetisi kapitalisme global. Menurut perspektif realis, ketidaksetaraan kekuatan (unequal power) dapat menciptakan logika yang tidak mendukung pasar kapitalis, oleh karena itu regionalisme digunakan untuk menciptakan kesetaraan kekuasaan. Sedangkan perspektif kontra-realisme menyatakan bahwa regionalisme merupakan sarana untuk memahami kondisi sosial-ekonomi yang berubah yang akan mengubah karakter, lingkup, dan arena kompetisi kekuasaan.

Bagi negara yang cenderung berada dalam posisi lemah dalam organisasi regional, **Hurrell** menjelaskan fungsi regionalisme adalah sebagai institusi pembentuk peraturan dan prosedur. Selain itu, institusi tersebut juga membuka “voice opportunities” atau kesempatan dan hak yang sama dalam berpendapat, membuka peluang membentuk koalisi yang lebih kuat, dan membuka wadah politis untuk membangun koalisi baru[[12]](#footnote-12). Sedangkan bagi negara yang relatif kuat, regionalisme berfungsi sebagai tempat untuk menjalankan strategi, tempat untuk mewadahi hegemoni, dan tempat untuk melegitimasi power*.[[13]](#footnote-13)*

Berdasarkan proses dalam politik global, Hurrell menganalisis regionalisme berdasarkan level atau tingkat interaksinya, yaitu secara sistemik, regionalisme dan interdependensi pada tingkat regional, dan teori pada level domestik. Untuk menganalisis interaksi dalam ketiga level sitem tersebut, digunakan dua teori, yaitu teori neo-realisme dan teori interdependensi struktural dan globalisasi.

Teori neo-realisme menekankan pada anarkisme sistem internasional dan kompetisi *power* serta politik dalam mencapai kepentingan. Berdasarkan perspektif ini, organisasi regional dipandang melalui kacamata politis sebagai upaya untuk membentuk aliansi bersama untuk merespon tantangan eksternal. Oleh karena penekanan perspektif ini pada politik dan power, maka hegemoni menjadi penting.

Sedangkan teori interdependensi struktural dan globalisasi memandang bahwa perubahan karakter dari sebuah sistem merupakan dampak dari perubahan ekonomi dan teknologi, sekaligus globalisasi. Jadi, perspektif ini menekankan pada perubahan sistem yang menyebabkan meningkatnya interdependensi antar negara sehingga regionalisme perlu dibentuk untuk mendapatkan kepentingan yang diinginkan. Selain itu, globalisasi ekonomi dan teknologi juga merupakan katalis bagi terciptanya regionalisme.

Pada tingkat regional, digunakan analisis menggunakan teori neo-fungsionalisme dan neo-liberal institusionalisme. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua teori pertama melihat regionalisme sebagai respon fungsional yang dilakukan oleh negara untuk menyelesaikan masalah yang diciptakan oleh adanya interdependensi regional dan menekankan pada peran strategis institusi regional dalam mengembangkan kepaduan regional dengan membentuk suatu organisasi regional salah satunya yang dibahas yaitu ASEAN.

**1. Pembentukan ASEAN**

Kawasan Asia Tenggara secara geopolitik dan geoekonomi mempunyai nilai strategis. Kondisi tersebut menyebabkan kawasan ini menjadi ajang persaingan pengaruh kekuatan negara adidaya pada era perang dingin antara blok barat dan blok timur.

Salah satu bukti persaingan antar negara adidaya dan kekuatan besar pada waktu itu adalah perang Vietnam antara Vietnam Utara yang didukung kekuatan komunis dan Vietnam Selatan yang didukung kekuatan barat pimpinan Amerika Serikat. Persaingan dua blok tersebut menyeret negara-negara di kawasan ASEAN menjadi basis kekuatan militer blok komunis dan barat. blok komunis di bawah komando Uni Soviet menempatkan pangkalan militernya di Vietnam, sedangkan blok barat di bawah komando Amerika Serikat menempatkan pangkalan militernya di Filipina. Selain terjadi persaingan di bidang ideologi antara kekuatan barat dan kekuatan timur, juga terjadi konflik militer di kawasan Asia Tenggara yang melibatkan tiga negara, yaitu Laos, Kamboja, dan Vietnam konflik bilateral, seperti konflik antara Indonesia dan Malaysia, Kamboja dan Vietnam; dan konflik internal, seperti di Kamboja, Thailand, dan Indonesia. Selain itu konflik kepentingan juga pernah terjadi sesama negara-negara anggota ASEAN seperti “konfrontasi” antara Indonesia dan Malaysia, klaim teritorial antara Malaysia dan Filipina mengenai Sabah, serta berpisahnya Singapura dari Federasi Malaysia.

Pembentukan organisasi regional di kawasan Asia Tenggara di awali dengan organisasi regional bentukan Amerika Serikat yakni SEATO *( South East Asia Treaty* *Organization)* pembentukan organisasi regional ini adalah merupakan upaya AmerikaSerikat untuk membendung pengaruh komunis di wilayah Asia Tenggara. Perang dingin yang terjadi pada dua negara adidaya dunia yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet berdampak langsung terhadap negra-negara kawasan Asia Tenggara. Pembentukan SEATO yang diprakasai Amerika Serikat ini dapat kita katakan sebagai bentuk “*aliansi”* Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara, karena pembentukan organisasi internasional SEATO tidak berasal dari negara-negra yang berada di kawasan ini tapi atas dasar prakarasa Amerika Serikat.

Sebelum ASEAN terbentuk sebelum 1967, negara-negara Asia tenggara telah melakukan berbagai upaya untuk menggalang kerjasama regional. Pembentukan organisasi regional yang diprakasai negara-negara kawasan Asia Tengara untuk pertama kalinya diawali dengan pembentukan *Association of Southeast* *Asia (ASA)* yang didirikan pada tahun 1961. Namun pecahnya konflik antara Philipinadan Malaysia pada tahun tersebut menghancurkan awal tersebut. Setelah berahirnya ASA, Maphilindo kemudian muncul sebagai organisasi regional yang baru yang merupakan kerjasama antara Malaysia, Philipina, dan Indonesia. Namun organisasi regional ini kemudian hancur karena politik konfrontasi Indonesia di bawah Presiden Soekarno yang menentang pembentukan negara Malaysia.[[14]](#footnote-14) Upaya pembentukan organisasi regional dikawasan ini memang mengalami pasang surut dikarenakan pembentukan negara-negara di kawasan ini pada masa itu terbilang negara-negara baru yang merdeka dari imperilaisme Barat, terlebih pada masa itu dua negara adikuasa dunia terkukung dalam perang dingin yang berkepanjangan.

Untuk mengatasi perseteruan yang sering terjadi di antara negara-negara Asia Tenggara dan membentuk kerjasama regional yang lebih kokoh maka lima negara yang merupakan *founding father[[15]](#footnote-15)* ASEAN (*Association South East Asian Nations*) Mentri Luar Negeri yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura, dan Thailand mengadakan pertemuan di Bangkok pada bulan Agustus 1967 yang menghasilkan rancangan *Joint Declaration*, yang pada intinya mengatur tentang kerjasama regional di kawasan tersebut.

Sebagai puncak dari pertemuan tersebut, maka pada tanggal 8 Agustus 1967 ditandatangani Deklasai ASEAN atau yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok oleh wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Malaysia dan para Menteri Luar Negeri dari Indonesia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Brunei Darussalam kemudian bergabung pada tanggal 8 Januari 1984, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Lao PDR dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, dan Kamboja pada tanggal 30 April 1999.

Deklarasi tersebut menandai lahirnya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of South East Asian Nations*/ASEAN). Masa awal pendirian ASEAN lebih diwarnai oleh upaya-upaya membangun rasa saling percaya (*confidence building*) antar negara anggota guna mengembangkan kerjasama regional yang bersifat kooperatif namun belum bersifat integratif.

Tujuan dibentuknya ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok adalah untuk:

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai;
2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi;
4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk saran-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, dan admistrasi;
5. Bekerjasama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internsional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat.
6. Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara; dan memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan yang serupa, dan untuk menjajagi segala kemungkinan untuk saling bekerjasama secara erat.

Lambat laun organisasi ini mengalami kemajuan yang cukup signifikan di bidang politik dan ekonomi, seperti disepakatinya Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral (*Zone of Peace, Freedom, and* *Neutrality Declaration/ZOPFAN*) yang ditandatangani tahun 1971. Kemudian, pada tahun 1976 limanegara anggota ASEAN itu juga menyepakati Traktat Persahabatan dan Kerjasama (*Treaty of Amity and* *Cooperation/TAC*).

Adapun prinsip utama dalam kerjasama ASEAN, seperti yang terdapat dalam TAC adalah; (i) saling menghormati, (ii) kedaulatan dan kebebasan domestiktanpa adanya campur tangan dari luar, (iii) *non inteference*,

(iv) penyelesaian perbedaan atau sengketa dengan cara damai, (v) menghindari ancaman dan penggunaan kekuatan/senjata, dan (vi) kerjasama efektif antara anggota.[[16]](#footnote-16)

**Gambar 2 Negara-negara anggota ASEAN**



Sejak didirikan tahun 1967, nampaknya, pembentukan ASEAN tidak ditujukan secara spesifik untuk merespon globalisasi. Namun, lebih pada keinginan utama untuk mendorong negara-negara di kawasan Asia Tenggara melakukan usaha-usaha kerjasama di bidang ekonomi dan kesejahteraan. Setidaknya, ada tiga tujuan pokok yang ingin diraih oleh ASEAN pada awalnya, yakni mempromosikan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia Tenggara melalui program-program kerjasama; menjaga stabilitas politik dan ekonomi kawasan, dan sebagai forum untuk resolusi atas perbedaan-perbedaan intraregional.

 Dari ketiga tujuan pokok ini, nampak bahwa kerjasama di bidang keamanan tidakmenjadi prioritas.[[17]](#footnote-17) Dalam perkembangannya, dina-mika kerjasama kawasan ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh besar globalisasi, terutama globalisasi ekonomi. Oleh karenanya, berbagai usaha dilakukan oleh ASEAN untuk “menyiapkan” diri dalam menghadapi globalisasi (ekonomi), yang semakin hari terpaannya semakin kuat. berbagai usaha untuk mengintegrasikan ekonomi kawasan melalui *ASEAN Free* *Trade Area* (AFTA) yang harapannyadapat memperkuat posisi ASEAN dalam mengintegrasikan diri ke dalam perdagangan global.

**C. Integrasi Ekonomi Kawasan Asia Tenggara dari ASEAN Free Trade Area (AFTA) menuju Masyrakat Ekonomi ASEAN (MEA)**

Paling tidak terdapat tiga gelombang integrasi regional sejak *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) disepakati pada tahun 1947. Gelombang pertama adalah integrasi regional Eropa di tahun 70-an yang menempatkan Eropa sebagai aktor utama dalam perdagangan global. Gelombang kedua dipicu oleh ketidakpuasan Amerika terhadap prinsip non diskriminasi dalam GATT yang bermuara pada pembentukan *North American Free Trade Agreement* (NAFTA) di awal era 90-an.

Gelombang ketiga adalah diinisiasi oleh negara-negara Asia dengan memperkenalkan preferensi tarif seperti *Economic Cooperation Organization* (ECO), (SAARC), dan *ASEAN.*[[18]](#footnote-18)

 Manfaat utama dari integrasi ekonomi yang mendorong integrasi regional berkembang secara global baik di Eropa, Amerika, maupun Asia adalah ekonomi. Integrasi ekonomi akan mendorong ekonomi melalui dua jalur: ukuran integrasi ekonomi dan realokasi sumber daya ekonomi[[19]](#footnote-19). Lebih lanjut, bahwa integrasi ekonomi di suatu kawasan akan menghasilkan beberapa manfaat bagi negara yang melakukan integrasi, seperti: (1) mendorong berkembangnya industri local; (2) peningkatan manfaat perdagangan melalui perbaikan *terms of tade*; dan (3) mendorong efisiensi ekonomi di suatu kawasan ekonomi.

Pembentukan integrasi ekonomi di suatu kawasan ditujukan untuk alokasi sumber daya lebih efisien, mendorong persaingan, dan meningkatkan skala ekonomi dalam produksi dan distribusi di antara negara anggota. Ukuran integrasi ekonomi terkait dengan jumlah sumber daya yang dimiliki masing-masing negara.

Semakin besar sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara maka akan mendorong ekonomi untuk memproduksi lebih banyak produk tertentu dan akumulasi produk ini akan mendorong penggunaan sumber daya yang lebih produktif.

Kompleksitas integrasi ekonomi dan tingkatan intensitas yang berbeda mendorong munculnya analisis untuk membedakan tahapan integrasi ekonomi. Pendekatan tahapan integrasi yang digunakan secara luas adalah tahapan integrasi. Tahapan integrasi terbagi dalam enam tahap (Tabel 2).

**Tabel 2 Tahapan integrasi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tahapan** | **Keterangan** |
| *Preferential trading area (PTA)* | Blok perdagangan yang memberikan keistimewaan untuk produk-produk tertentu dari negara tertentu dengan melakukan pengurangan tarif namun tidak menghilangkanya sama sekali. |
| *Free trade area (FTA)* | Suatu kawasan dimana tarif dan kuota antara negara anggota dihapuskan, namun masing-masing negara tetap menetapkan tarif mereka masing-masing terhadap negara bukan anggota. |
| *Custom union**(CU)* | Merupakan FTA yang meniadakan hambatan –hambatan komoditi antar negara dan menetapkan tarif yang sama terhadapa negara bukan anggota |
| *Common market (CM)* | Merupakan CU yang juga meniadakan hambatan-hambatan pada pergerakan faktor-faktor produksi (barang, jasa, aliran modal). Kesamaan harga dari faktor-faktor produksi diharapkan dapat menghasilkan alokasi sumber yang efisien. |
| *Economic union* | Merupakan suatu CM dengan tingkat harmonisasi kebijakan ekonomi nasional yang signifikan (termasuk kebijakan struktural). |
| *Total economic integration* | Penyatuan moneter, fiskal, dan kebijakan sosial yang diikuti dengan pembentukan lembaga supranasional dengan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh negara anggota. |

*Sumber: (Samsul Arifin et al. 2008*

Tahapan integrasi ini memberikan urutan untuk keperluan analisis dan membantu memahami tambahan kebijakan yang diperlukan dalam setiap tambahan integrasi apabila suatu kelompok negara ingin mencapai tahapan integrasi yang lebih tinggi. Meski tahapan tersebut dalam perkembangannya telah mengalami penyesuaian pada berbagai hal, pendekatan ini masih tetap menjadi alat dasar dalam studi mengenai integrasi. Secara teoritis, tahapan integrasi balassa menunjukan bahwa semakin tinggi tahapan integrasi ekonomi, semakin kompleks persyaratan kebijakan yang diperlukan.

**1.**  **Integrasi ASEAN**

Dalam lingkup ASEAN, khususnya jika dikaitkan dengan MEA sebagai salah satu bagian dari Masyarakat ASEAN (ASEAN Community), Negara-negara ASEAN belum menetapkan tingkatan integrasi yang jelas. Dalam rumusan yang disepakati oleh para kepala negara dan pemerintahan ASEAN, tujuan dari AEC adalah untuk menciptakan ‘*a single market and production based’*. Ini dapat diartikan sebagai integrasi penuh, kecuali dalam bidang keuangan dan moneter yang masih merupakan kewenangan negara anggota.

Ada dua tingkatan integrasi regional yang dapat dipilih oleh ASEAN, seperti yang ditawarkan oleh Hew dan Soesastro, yang pertama, suatu MEA merupakan suatu “*FTA-plus”* yaitu suatu kawasan perdagangan bebas ASEAN dengan tarif nol ditambah beberapa elemen dari suatu pasar bersama, misalnya arus bebas modal dan tenaga terdidik. Pendekatan ini didasarkan pada tingginya tingkat perbedaan antara Negara-negara anggota ASEAN maka tidak mungkin diterapkan tariff tunggal bersama (*common external tariff*) seperti pada kawasan kesatuan pabean (*custom union)*. Kedua, MEA sebagai suatu ‘*Common Market-Minus’* yaitu suatu bentuk akhir integrasi ekonomi ASEAN pada 2015 adalah beru pa pasar bersama dengan menetapkan suatu bidang tertentu sebagai integrasi yang lebih dalam dengan waktu yang lebih lama dan tidak ada perkecualian. Ini merupakan *common market* dengan pengecualian yang disepakati bersama.

Liberalisasi di dalam ASEAN pada awalnya dimulai pada awal pembentukan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) yang kemudian menjadi cikal bakal pembnetukan *ASEAN Economic Community* yang lebih komperenshif. Pada bagian ini, kita akanmembahas tentang liberalisasi perdagangan yang ada dalam ASEAN yang diawali dari pembentukan AFTA tersebut yang kemudian menuju kerjasama kawasan yang lebih konperenshif yang diwujudkan dalam satu Komunitas Ekonomi ASEAN[[20]](#footnote-20).

**2. Pembentukan AFTA**

Liberalisasi perdagangan yang kemudian lebih kita kenal dengan penyebutan pasar bebas berawal dari pendekatan liberalisme interdependensi yang memperhatikan secara khusus pada hubungan ekonomi dalam pertukaran dan ketergantungan antara rakyat dan pemerintah. Paham liberal dalam Hubungan Internasional (HI) berpendapat bahwa prncapaian kepentingan bisa dicapai dengan kesalingtergantungan. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang liberalisasi perdagangan di kawasan Asia Tenggara, penjelasan secara definitif dan konseptual apa yang dimaksud dengan perdagangan bebas perlu untuk disampaikan. Menurut Jagdish Bhagwati pasar bebas merupakan soal berbagi hasil dalam proses pertukaran.[[21]](#footnote-21) Munculnya fenomena perdagangan bebas di kawasan menjadi satu telaah teoritik yang menarik dalam studi HI.

Suksenya integrasi ekonomi di kawasan Eropa menjadi salah satu contoh dari suksesi integrasi di kawasan tersebut. Perjanjian Masyarakat Ekonomi Eropa di tandatangani pertama kali pada 25 Maret 1957 Roma. Selain mengesahkan perjanjian Masyarakat Ekonomi Eropa, disahkan juga Energi Atom Eropa. Kedua perjanjian tersebut mulai berlaku tahun 1958. Suksenya integrasi yang terjadi dalam Uni Eropa menjadi contoh bagi kawasan Asia Tenggara, yakni ASEAN.

Liberalisasi perdagangan di kawasan Asia Tenggara dimulai pada pembentukan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA)[[22]](#footnote-22)yang disepakati pada tahun 1992. Pembentukan AFTAdidasari atas beberapa faktor. *Pertama* berakhirnya konflik Kamboja yang mana arah baru mempertahankan relevansi ASEAN dari isu tantangan politik dan militer pasca perang dingin ke isu ekonomi yang mencuat dalam ASEAN. *Kedua*, dorongan Singapura yang mengandalkan perdagangan bebas mendorong terbentuknya satu kerja sama ekonomi yang lebih terbuka dan liberal. *Ketiga*, keinginan yang kuat untuk mendatangkan para investor asing. Dan *keempat*, terdorong atas motivasi tumbuhnya blok ekonomi regional di kawasan lain.[[23]](#footnote-23)

Tujuan akhir dari kesepakatan AFTA adalah meningkatkan daya saing di kawasan regional sebagai basis produksi untuk pasar dunia. Terbentuknya AFTA di kawasan ini dilihat sebagai respon dan langkah persiapan untuk bisa bersaing dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Penciptaan pasar bebas pada AFTA dilakukan dengan penghapusan hambatan tarif dan non-tarif di antara anggota ASEAN. Selain dari penurunan tarif bagi produk yang diperdagangkan di kawasan ASEAN melalui skema CEPT *(Common* *Effective Preferential Tariff)*, pembentukan AFTA juga dimaksudkan untuk menciptakanpasar yang lebih besar sehingga dapat bersaing dengan China dan sekaligus menarik investasi asing.[[24]](#footnote-24) Namun perlu digaris bawahi bahwa pembentukan AFTA bukan sebagai pembentukan pasar yang seluas luasnya. Negara masih masih melindungi industri dalam negerinya. Pembentukan AFTA dalam ASEAN ini kemudian menjadi landasan ASEAN untuk membentuk integrasi ekonomi yang lebih mantap dengan pembentukan ASEAN Economic Community yang disepakati pada *Concord II* Bali 2003.

**3. Pembentukan ASEAN Economic Community (AEC)**

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa integrasi ekonomi yang terjadi dalam ASEAN di mulai sejak pembentukan AFTA. Pembentukan integrasi yang lebih tinggi dalam ASEAN kemudian diwujudkan dalam bentuk pengesahan Komunitas ASEAN *(ASEAN Community)* Selama empat dekade keberadaannya, ASEAN telah mengalami banyakperubahan serta perkembangan positif dan signifikan yang mengarah pada pendewasaan.

Kerjasama ASEAN kini menuju tahapan baru yang lebihintegratif dan berwawasan salah satunya; pasar ASEAN yang sudah terbuka dan menyatu dengan pasar global ditambah dengan tersedianya barang-barang produksi yang dihasilkan oleh supplier dari negara-negara ASEAN sangat membantu Negara-negara anggota ASEAN untuk semakin menarik investor asing masuk ke kawasan.

Sehingga, *Cebu* *Declaration* pada 13 Januari 2007 (12th ASEAN *Summit*) memutuskan untukmempercepat pembentukan MEA menjadi 2015 Hal ini diperkuat dengan disahkannya Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) yang secara khusus akan menjadi landasan hukum dan landasan jati diri ASEAN ke depannya guna memperkuat daya saing ASEAN dalam menghadapi kompetisi global. Dengan beberapa pertimbangan yang mendasari hal tersebut adalah: (i) potensi penurunan biaya produksi di ASEAN sebesar 10-20 persen untuk barang konsumsi sebagai dampak integrasi ekonomi; (ii) meningkatkan kemampuan kawasan dengan implementasi standar dan praktik internasional, *intelectual* *proverty rights,* dan peningkatan daya saing. Dengan integrasi ekonomidiharapkan infrastruktur kawasan dapat lebih berkembang bersamaan dengan integrasi transportasi, telekomunikasi dan energi.[[25]](#footnote-25)

 Untuk memperkuat langkah percepatan integrasi ekonomi tersebut, ASEAN melakukan transformasi kerja sama ekonomi dengan meletakkan sebuah kerangka hukum yang menjadi basis komitmen negara ASEAN melalui penandatanganan Piagam ASEAN (ASEAN *Charter*) pada KTT ASEAN ke-13, 20 November 2007. Selanjutnya, pada tahun 2008, MEA *Blue Print* mulai di implekasikan dan ASEAN *Charter* mulai berlaku pada 16 Desember 2008.

Cetak biru yang merupakan arah panduan MEA dan jadwal strategis tentang waktu dan tahapan pencapaian dari masing-masing pilar juga disepakati[[26]](#footnote-26).

Dalam rangka memantau kemajuan implementasi MEA disusun ASEAN *Baseline Report* (ABR) yang berperan sebagai *score card* melalui tiga kategoriyaitu: indikator proses *(process indikators)*, indikator output *(output indikators)* dan indikator hasil *(outcome indikators)* yang kemudian menjadi indeks tingkat negara dan kawasan. Indeks tingkat negara digunakan untuk perbandingan antarnegara dalam pencapaian tujuan Masyarakat ASEAN. Sementara, indeks level kawasan digunakan untuk menilai kinerja secara keseluruhan kawasan pada setiap tujuan Masyarakat ASEAN.[[27]](#footnote-27)

**4. Transformasi ASEAN menuju MEA 2015**

1. **ASEAN *Vision 2020***

Pada Konferensi Tingkat Tingkat Tinggi ke-2 ASEAN tanggal 15Desember 1997, di Kuala Lumpur, Malaysia, para pemimpin ASEAN mengesahkan visi ASEA 2020 dengan tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing yang tinggi ditandai dengan arus lalu lintas barang, jasa-jasa, dan investasi yang bebas, arus lalu lintas yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang merata, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi.
2. Mempercepat liberalisasi di bidang jasa.
3. Meningkatkan pergerakan tenaga profesional dan jasa lainnya secara bebas di kawasan.[[28]](#footnote-28)

***b. Hanoi Plan of Action***

Pada KTT ke-6 ASEAN tanggal 16 Desember 1998 di Hanoi – Vietnam,para Pemimpin ASEAN mengesahkan Rencana Aksi Hanoi (*Hanoi Plan of* *Action*/HPA) yang merupakan langkah awal untuk merealisasikan tujuan dari visi 2020 ASEAN. Rencana aksi ini memiliki batasan waktu 6 tahun yakni dari tahun 1999 s/d 2004.

Pada KTT tersebut, para pemimpin ASEAN juga mengeluarkan *Statement* *on Bold Measures* dengan tujuan untuk mengembalikan kepercayaan pelakuusaha, mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi setelah krisis ekonomi dan finansial.[[29]](#footnote-29)

1. ***Roadmap for Integration of* ASEAN (RIA)**

Pada KTT ke-7 ASEAN tanggal 5 November 2001 di Bandar SeriBegawan-Brunei Darussalam, disepakati perlunyadibentuk *Roadmap for* *Integration of* ASEAN (RIA) guna memetakan tonggak penting yang harusdicapai berikut langkah-langkah spesifik dan jadwal pencapaiannya.Menindaklanjuti kesepakatan KTT ke-7 tersebut, para Mentri Ekonomi ASEAN dalam pertemuannya yang ke-34 tanggal 12 September 2002 di Bandar Seri Begawan-Brunei Darussalam mengesahkan RIA dimaksud. Di bidang perdagangan jasa sejumlah rencana aksi telah dipetakan, antara lain:

1. Mengembangkan dan menggunakan pendekatan alternatif untuk liberalisasi.
2. Mengupayakan kerangka regulasi yang sesuai.
3. Menghapuskan semua halangan yang menghambat pergerakan bebas perdagangan jasa di ASEAN.
4. Menyelesaikan kesepakatan Pengakuan Timbal Balik untuk bidang jasa profesional.
5. ***Bali Concord* II**

Krisis ekonomi yang terjadi di kawasan Asia Tengara pada periode 1997-1998 memicu kesadaran negara-negara ASEAN mengenai pentingnya peningkatan dan penguatan kerjasama intra-kawasan. ASEAN *Economic* *Community* merupakan konsep yang mulai digunakan dalam *Declaration of* ASEAN *Concord II (Bali Concord II)*, di Bali, bulan Oktober 2003.Kemudian ASEAN baru mengadopsi *Bali Concord II* pada KTT ke-9 ASEAN di Bali pada tahun 2003 yang meyetujui pembentukan Komunitas ASEAN (ASEAN *Community*). Pembentukan Komunitas ASEAN ini merupakan bagian dari upaya ASEAN untuk lebih mempererat integrasi ASEAN. Selain itu juga merupakan upaya ASEAN untuk menyesuaikan cara pandang agar dapat lebih terbuka dalam membahas permasalahan domestik yang berdampak pada kawasan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utama ASEAN yaitu saling menghormati (*mutual respect*), tidak mencampuri urusan dalam negeri (*non-interference*), konsensus, dialog, dan konsultasi.

Pembentukan Komunitas ASEAN 2015 berlandaskan pada 3 pilar, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security* *Community)*, Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community),* danKomunitas Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community)*.

Pada saat berlangsungnya KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, Laos, tahun 2004 konsep Komunitas ASEAN mengalami kemajuan dengan disetujuinya *Vientiane Action Program (*VAP*)* 2004-2010 yang merupakan strategi danprogram kerja untuk mewujudkan ASEAN Vision. Berdasarkan hal tersebut, *High* *Level Task Force (*HLTF*)* diberikan kewenangan untuk melakukan evaluasi danmemberikan rekomendasi dalam mewujudkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, yang merupakan program pelaksanaan pada 6 tahun kedepan sekaligus merupakan kelanjutan dari HPA guna merealisasikan tujuan akhir dan visi ASEAN 2020 dan Deklarasi *Bali Concord II.*

Pencapaian ASEAN Community semakin kuat dengan ditandatanganinya *“Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of* ASEAN *Community by 2015”* oleh para Pemimpin Negara ASEAN pada KTT ke-12ASEAN di Cebu, Filipina, pada 17 Januari 2007. Para pemimpin ASEA juga menyepakati percepatan pembentukan ASEAN *Economic Community* (AEC) dari tahun 2020 menjadi tahun 2015.

Keputusan untuk mempercepat pembentukan AEC menjadi 2015 ditetapkan dalam rangka memperkuat daya saing ASEAN dalam menghadapi kompetisi global seperti dengan India dan China. Selain itu beberapa pertimbangan yang mendasari hal tersebut adalah: (i) potensi penurunan biaya produksi di ASEAN sebesar 10-20 persen untuk barang konsumsi sebagai dampak integrasi ekonomi; (ii) meningkatkan kemampuan kawasan dengan implementasi standar dan praktik internasional, HAKI dan adanya persaingan.

Konsep Komunitas Ekonomi ASEAN dapat dilihat dari beberapa butir penting dalam Deklarasi Bali Concord II mengenai komunitas ASEAN:

1. Komunitas ASEAN adalah realisasi tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang digariskan dalam ASEAN Vision 2020 untuk menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, sejahtera dan berdaya saing tinggi.
2. Landasan bagi Komunitas Ekonomi ASEAN adalah kepentingan bersama diantara negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas usaha-usaha integrasi ekonomi lewat kerjasama yang sedang berjalan dan inisiatif baru dalam kerangka waktu yang jelas.
3. Komunitas ASEAN perlu menjadikan ASEAN sebagai suatu pasar tunggal dan basis produksi, dengan mengubah keanekaragaman yang menjadikarakter kawasan menjadi peluang bisnis yang saling melengkapi.
4. Komunitas Ekonomi ASEAN perlu menjamin bahwa perluasan dan pendalaman integrasi ASEAN harus dibarengi dengan kerjasama teknik dan pembangunan dalam usaha mengatasi jurang pembangunan dan mempercepat integrasi ekonomi anggota baru (Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam).
5. Untuk mencapai komunitas ekonomi yang terintegrasi secara penuh, ASEAN perlu menerapkan langkah-langkah liberalisasi dan kerjasama.[[30]](#footnote-30)
6. **ASEAN *Charter* (Piagam ASEAN)**

Guna mempercepat langkah percepatan integrasi ekonomi tersebut,ASEAN menyusun ASEAN *Charter* (Piagam ASEAN) sebagai “payung hukum” yang menjadi basis komitmen dalam meningkatkan dan mendorong kerjasama diantara negera-negara anggota ASEAN di kawasan Asia Tenggara. Piagam tersebut juga memuat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh seluruh negara anggota ASEAN dalam mencapai tujuan intergrasi di kawasan ASEAN.

Lahirnya piagam ASEAN telah dimulai sejak dicangkannya *Vientiane* *Action Programme* (VAP) pada KTT ASEAN ke-10 di Vientiane, Laos padatahun 2004. KTT ASEAN ke-12 d Cebu, Filipina pada tahun 2007 telah membentuk *High Level Task Force (*HLTF*) on the* ASEAN *Charter* yang bertugas merumuskan naskah piagam ASEAN dengan memperhatikan rekomendasi *Eminent Person Group (*EPG*) on the* ASEAN *Charter.*

Naskah Piagam ASEAN kemudian ditandatangani oleh para Kepala Negara/Pemerintahan negara-negara anggota ASEAN pada KTT ke-13 di Singapura, 20 November 2007. Piagam ASEAN ini mulai berlaku efektif bagi semua Negara Anggota ASEAN pada tanggal 15 Desember 2008.

Indonesia telah melakukan ratifikasi piagam ASEAN pada tanggal 6 November 2008 dalam bentuk Undang-Undang no. 38 tahun 2008, tentang pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara).[[31]](#footnote-31)

**Tabel 3 : *ASEAN Economic Community* dalam piagam ASEA**

ASEAN Charter

ASEAN Economic Community 2015

Cetak Biru

Jadwal Strategis

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasar tunggal basis produksi | Kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi | MmPertumbuhan ekonomi yang merata | Integerasi ke pertumbuhan ekonomi global |
| Melalui aliran bebas di:* Barang
* Jasa
* Investasi
* TKI Terampil
* Modal
* 12 Sektor Prioritas
* Pengembangan sektor makanan, pertanian dan kehutanan
 | K* Kebijakan ekonomi yang berdaya saing
* Perlindungan konsumen
* Pengembangan infrastruktur
* Perpajakan
* E-Commerce
 | * Pengembangan UMKM
* Inisiatif integrative
 | P* Pendekatan koheren ekonomi eksternal
* Partisipasi di *global supply network*
 |

1. **ASEAN *Economic Community (*AEC*) Blueprint***

Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang dilaksanakan pada bulanAgustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, sepakat untuk mengembangkan ASEAN *Economic Community Blueprint* yang merupakan panduan untuk terwujudnya AEC. *Declaration on* ASEAN *Economic Community Blueprint*, ditandatanganipada tanggal 20 November 2007, memuat jadwal strategis untuk masing-masing pilar yang disepakati dengan target waktu yang terbagi dalam empat fase yaitu tahun 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015.

Penandatanganan AEC Blueprint dilakukan bersamaan dengan penandatanganan Piagam ASEAN (ASEAN *Charter*). AEC *Blueprint* merupakan pedoman bagi negara-negara anggota ASEAN untuk memcapai AEC 2015, dimana masing-masing negara berkewajiban untuk melaksanakan komitment dalam *blueprint* tersebut. AEC *Blueprint* memuat empat kerangka utama yaitu:

1. Pasar tunggal dan basis produksi, dengan 5 (lima) elemen utama yaitu: (i) aliran bebas barang, (ii) aliran bebas jasa, (iii) aliran bebas investasi, (iv) aliran bebas tenaga kerja terampil, dan (iv) aliran modal yang lebih bebas. Disamping kelima elemen tersebut, pasar tunggal dan basis produksi juga mencakup 2 (dua) komponen penting lainnya, yaitu Sektor Integrasi Prioritas (*Sector Integration Priority*/PIS) dan kerjasama di bidang pangan, pertanian, dan kehutanan.
2. Kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, dengan 6 (enam) elemen utama yaitu : (i) kebijakan persaingan usaha,(ii) perlindungan konsumen (iii) hak atas kekayaan intelektual (HKI), (iv) pembangunan infrastruktur, (v) perpajakan, dan (vi) *e-commerce*.
3. Kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global, dengan 2 (dua) elemen utama yaitu: (i) pendekatan terpadu terhadap ekonomi di luar kawasan, dan (ii) peningkatan partisipasi dalam jaringan pasokan global.[[32]](#footnote-32)
4. ***Roadmap for* ASEAN*Community (2009-2015)***

Pada KTT ke-14 ASEAN tanggal 1 Maret 2009 i Hua Hin – Thailand, paraPemimpin ASEAN menandatangani Roadmap for an ASEAN *Community* (2009-2015) atau Peta Jalan menuju ASEAN *Community* (2009-2015), sebuah gagasan baru untuk menimplementasikan secara tepat waktu tiga *Blueprint* (Cetak Biru) ASEAN *Community* yaitu *(1)* ASEAN *Political-Security Community, (2)* ASEAN *Economic Community, (3)* ASEAN *Socio-Cultural Community, serta Innisiative for* ASEAN *Integration (*IAI*) Strategic Framework dan* IAI *Work Plan 2 (2009-2015).*

Peta jalan tersebut menggantikan program aksi *Vientiane* (*Vientiane* *Action Program*/VAP), dan di implementasikan serta dimonitor oleh BadanKementrian Sektoral ASEAN dan Sekretaris Jendral ASEAN, dengan didukung oleh Komite Perwakilan tetap.

Perkembangan terkait dengan implementasi ketiga *peta-jalan* tersebut disampaikan secara reguler kepada para Pemimpin ASEAN melalui Dewan Komunitas ASEAN (ASEAN *Community Council*/ACC)-nya masing-masing.

**5. Struktur Kelembagaan MEA**

Dalam melaksanakan proses integrasi ekonomi ASEAN menuju AEC2015, sesuai dengan poagam ASEAN, dibentuk struktur kelembagaan ASEAN yang terdiri dari ASEAN *summit*, ASEAN *Coordinating Council*, ASEAN *Community Council*, ASEAN *Economic Ministers*, ASEAN *Free Trade AreaCouncil*, ASEAN *Investmen Area Council*, *Senior Economic Officials Meeting*, dan Coordinating Commitee. Langkah awal kesiapan ASEAN dalammenjalankan integrasi ekonominya setelah diberlakukannya piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) adalah dengan ditetapkannya Wakil Sekretaris Jendral ASEAN Bidang ASEAN *Economic Community*/AEC dengan tugas mengawasi implementasi AEC Blueprint, memantau, dan memfasilitasi proses kesiapan kawasan menghadapi perekonomian global, serta mendukung pelaksanaan inisiatif lainnya dalam rangka integrasi ekonomi ASEAN.

1. **ASEAN *Summit***

ASEAN *Summit* merupakan pertemuan tingkat kepalanegara/pemerintahan ASEAN, yang berlangsung 2 (dua) kali dalam setahun dan diselenggarakan secara bergilir berdasarkan alfabet di negara yang sedang menjabat sebagai ketua ASEAN. Secara rinci dalam Piagam ASEAN pasal 7 bahwa ASEAN *Summit* adalah:

1. Merupakan badan pengambil kebijakan tertinggi ASEAN.
2. Membahas, memberikan arahan kebijakan dan mengambil keputusan atas isu-isu utama yang menyangkut realisasi tujuan-tujuan ASEAN, hal-hal pokok yang menjadi kepentingan negara-negara anggota dan segala isu yang dirujuk kepadanya oleh ASEAN *Coordinating Council* (Dewan Koordinasi ASEAN), ASEAN *Community Council* (Dewan Komunitas ASEAN) dan ASEAN *Sectoral Ministerial Bodies* (Badan Kementrian Sektoral ASEAN).
3. Menginstruksikan para Menteri yang relevan di tiap-tiap Dewan terkait untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan antar-Menteriyang bersifat ad hoc, dan membahas isu-isu penting ASEAN yang bersifat lintas Dewan Komunitas. Aturan pelaksanaan pertemuan dimaksud diadopsi oleh Dewan Koordinasi ASEAN, dalam hal Indonesia, dikoordinasikan oleh oleh Departemen Luar Negeri dengan mengundang departemen terkait di bidang masing-masing.
4. Menangani situasi darurat yang berdampak pada ASEAN dengan mengambil tidakan yang tepat.
5. Memutuskan hal-hal yang dirujuk kepadanya berdasarkan Bab VII dan VIII di Piagam ASEAN.
6. Mengesahkan pembentukan dan pembubaran Badan-badan Kementrian Sektoral dan Lembaga-lembaga ASEAN.
7. Mengankat Sekretaris Jenderal ASEAN, dengan pangkat dan status setingkat Menteri, yang akan bertugas atas kepercayaan dan persetujuan Kepala Negara/Pemerintahan berdasarkan rekomendasi pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN
8. **ASEAN *Coordinating Council (ACC)***

ASEAN *Coordinating Council* adalah dewan yang dibentuk untukmengkoordinasikan seluruh pertemuan tingkat Menteri ASEAN yang membawahi ketiga ASEAN *Community Council* yaitu ASEAN *Political-Security Council*, ASEAN *Economic Community Council*, ASEAN *Socio-Cultural Community* *Council.* ACC melakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun sebelumASEAN Summit berlangsung. Berdasarkan amanat Piagam ASEAN pasal 8 tugas dan fungsi ASEAN *Coordinating Council* adalah untuk:

1. Menyiapkan pertemuan ASEAN *Summit*;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan perjanjian dan keputusan ASEAN *Summit*;
3. Berkoordinasi dengan ASEAN *Community Council* untuk meningkatkan keterpaduan kebijakan, efisiensi dan kerjasam antar mereka;
4. Mengkoordinasikan laporan ASEAN *Community Council* kepada ASEAN *Summit*;
5. Mempertimbangkan laporan tahunan sekretaris jenderal ASEAN mengenai hasil kerja ASEAN;
6. Menpertimbangkan laporan Sekretaris Jenderal ASEAN mengenai fungsi-fungsi dan kegiatan sekretariat ASEAN serta badan relevan lainnya;
7. Menyetujui pengangkatan dan pengakhiran para Deputi Sekretaris Jederal ASEAN berdasarkan rekomendasi Sekretaris Jederal; dan
8. Menjalankan tugas lain yang diatur dalam Piagam ASEAN atau fungsi lain yang ditetapkan oleh ASEAN *Summit*.
9. **ASEAN *Economic Community Council* (AEC*Council*)**

ASEAN *Economic Community Council* merupakan dewan yangmengkoordinasikan semua *economic sectoral ministers*seperti bidang perdagangan, keuangan, pertanian dan kehutanan, energi, perhubungan, pariwisata dan telekomunikasi dan lain-lain.

Pertemuan AEC berlangsung sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun yang dirangkaikan dengan pertemuan ASEAN *Summit*. Wakil Indonesia untuk peretmuan AEC Council adalah Mentri Koordinator Bidang Perekonomian dengan Mentri Perdagangan sebagai *alternate.* AEC *Council* bertugas untuk melaporkan kemajuan dibidang kerjasam ekonomi kepada Kepala Pemerintahan/Negara ASEAN.

1. **ASEAN *Economic Ministers* (AEM)**

ASEAN *Economic Ministers* merupakan Dewan Menteri yang mengkoordinasikan negosiasi dan proses integrasi ekonomi. Para AEM melakukan pertemuan AEM, AEM *Retreat*, dan dalam rangkaian ASEAN Summit. AEM menyampaikan laporannya kepada AEM *Council*, dan selanjutnya melaporkan semua hasil-hasil implementasi *Blueprint* kepada ASEAN *Summit*. Di bawah koordinasi AEM terdapat AFTA *Council* dan AIA *Council,* masing-masing dewan Meteri yang membidangi bidang barang dan investasi.

AEM dalam setiap pertemuannya menerima aporan menerima laporan dan serta membahas isu- isu yang masih *pending*di tingkat SEOM. AEM selanjutnya menyampaikan laporan secara komprehensif implementasi ASEAN *Blueprint* kepada AEC *Council* pada pertemuan ASEAN *Summit*. Menteri Ekonomi Indonesia yang mewakili Indonesia dalam AEM adalah Meteri Perdagangan.

1. **ASEAN *Free Trade Area Council* (AFTA *Council*)**

AFTA *Council* adalah Dewan Menteri ASEAN yang pada umumnyadiwakili oleh Menteri Ekonomi masing-masing Negara Anggota bertanggung jawab atas proses negosiasi dan implementasi komitmen di bidang perdagangan barang ASEAN. AFTA *Council* melakukan pertemuan tahunan para Menteri Ekonomi ASEAN dalam rangkaian pertemuan sebelum AEM.

Dalam pertemuannya, AFTA *Council* pada umumnya menerima laporan dari *Coordinating Committee on the Implementation on the CEPT Scheme for AFTA* (CCCA) dan membahas isu-isu yang masih pending di tingkat SEOM. Koordinator AFTA *Council* untuk Indonesia adalah Menteri Perdagangan.

1. **ASEAN *Investment Area Council* (AIA *Council*)**

AIA *Council* adalah Dewan Menteri ASEAN yang bertanggungjawab atasproses negosiasi dan implementasi komitmen dibidang investasi ASEAN. Pada umumnya AIA *Council* mengadakan pertemuan tahunan dalam rangkaian dengan pertemuan AEM. AIA *Council* menerima laporan dari pertemuan *Coordinating* *Committee on Investment* (CCI) dan membahas isu-isu yang masih pending ditingkat SEOM. Koordinator Indonesia pada AIA *Council* adalah kepala BKPM yang didampingi oleh Mentri Perdagangan pada setiap pertemuan.

1. ***Senior Economic Official Meeting* (SEOM)**

SEOM merupakan pertemuan ASEAN di tingkat pejabat Eselon 1 yangmenangani bidang ekonomi. Pertemuan diadakan 4 (empat) kali dalam setahun, SEOM 1, 2, 3, dan 4. Dalam dua pertemuan SEOM (1 dan 3), pertemuan fokus pada isu intra-ASEAN sedangkan pada 2 pertemuan SEOM lainnya (2 dan 4), ASEAN mengundang Negara Mitra Dialog yaitu China, Jepang, Korea, India, Australia dan New Zealand untuk melakukan konsultasi dengan SEOM ASEAN.

SEOM dalam pertemuannya menerima laporan hasil pertemuan dari dan membahas isu yang masih *pending* di tingkat *Coordinating Committee/Working* *Group.*Selain SEOM, ASEAN membentuk task force tingkat pejabat Eselon 1, High Level Task Force (HLTF). HLTF dalam pertemuannya membahas isu-isu penting yang masih pending dan memerlukan pertimbangan khusus untuk dilaporrkan di tingkat Menteri. Pertemuan HLTF biasanya hanya dihadiri oleh SEOM+1.

1. ***Coordinating Committees / Working Group***

Merupakan pertemuan teknis setingkat pejabat Eselon 2 atau PejabatEselon 3 di instansi terkait masing-masing Negara Anggota ASEAN. Pertemuan ini diadakan 4 (empat) kali dalam setahun, dimana hasil pertemuannya akan dilaporkan kepada SEOM untuk diteruskan kepada AEM, AEC Council, ASEAN *Coordinating Council* dan ASEAN *Summit*.

Dengan dibentuknya badan-badan dan struktur kelembagaan ASEAN Economic Community, maka tahap evolusi ASEAN yang diiringi *deepenin process* dalam aspek prinsip mekanisme kerjasama ASEAN *way* telah terpolarisasibahkan tersimplifikasi di dalam ASEAN *Charter*.

1. . Budi Winarno. 2008. “Politik Regionalisme dan Tantangan ASEAN di Tengah Arus Besar Globalisasi”, *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, Vol. 5, No. 2, hal: 2 Juni 2008, Yogyakarta : Guru besar Ilmu Politik dan Hubungan Internasional, FISIPOL, Universitas Gadjah Mada. [↑](#footnote-ref-1)
2. . Cohn, Theodore H. 2003. *Global Political* *Economy: Theory and Practice*. Second Edition. New York: San Fransisco: Longman. [↑](#footnote-ref-2)
3. . Held, David *et.al*., 1999, *Global Trans-formations: Politics,Economic, and Culture*, Stanford, California: Stan-ford University Press. [↑](#footnote-ref-3)
4. . Budi Winarno. Op.Cit., Hal. 4. [↑](#footnote-ref-4)
5. . Gill, S. 2000. “The Constitution of Global Capitalism”. *A Paper* *Presented to A Panel: The Capitalist World, Past, and Present at the International Stu-dies Association Annual Convention*, Los Angeles,2000. [↑](#footnote-ref-5)
6. . Gilpin, Robert dan Jean M. Gilpin. 2001. *Global Political Economy Unde-rstanding the International Economic Order*. Princeton and Oxford:Princeton University Press. [↑](#footnote-ref-6)
7. . Garrett, Geofrey. 2000. “Global Markets and National Politics,” dalam Da-vid Held and Anthony Mc-Grew (eds.). 2000. *The* *Global Tran sforma-tion: a Reader.* Cambridge: PolityPress. [↑](#footnote-ref-7)
8. . Soesastro, Hadi. 2003. “Accelarating ASEAN Economic Integration: Moving Beyond AFTA”. *Paper* *presented at the second ASEAN Leadership Forum*, Kuala Lumur, 17March 2005. [↑](#footnote-ref-8)
9. . Budi Winarno. Op.Cit., Hal. 8. [↑](#footnote-ref-9)
10. . Nuraeni S, Deasy Silva, Arifin Sudirman.2010. Regionalisme dalam Hubungan Internasional.Yogyakarya:Pustaka Pelajar. Hal 21 [↑](#footnote-ref-10)
11. . *Ibid* hal 22 [↑](#footnote-ref-11)
12. . *Ibid*. hal 27 [↑](#footnote-ref-12)
13. . *Ibid*. hal 48 [↑](#footnote-ref-13)
14. . Menuju ASEAN Economic Community 2015, (Departemen Perdagangan Republik Indonesia), pdf, hlm.1. [↑](#footnote-ref-14)
15. . Ade Maman Suherman, *Op.cit*., hlm. 142. [↑](#footnote-ref-15)
16. . ASEAN Secretariat, *ASEAN Vision 2020*, ASEAN Secretariat, Jakarta, 15 December 1997.

([www.aseansec.org/2357.htm](http://www.aseansec.org/2357.htm)), diakses pada 3 maret 2017. [↑](#footnote-ref-16)
17. . ASEAN Secretariat, Chairman’s Statement of the 10th ASEAN Summit, Vientiane, 29 November

2004. (http://www.aseansec.org/16631.htm), diakses pada 3 maret 2017. [↑](#footnote-ref-17)
18. . Pomfret, R. (2006). “Sequencing Regional Integration in Asia”. In Advanced Research in *Asian Economic Studies Vol.3: International Economic Integration and Asia*. Michael G. Plummer dan Erik Jones (eds).New Jersey: World Scientific. [↑](#footnote-ref-18)
19. . Bretschger, L and T.M. Steger. (2004). The Dynamics of Economic Integration: Theory and Policy. *WIF: Institute of Economic Research Working Paper* 04/32. [↑](#footnote-ref-19)
20. . Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2009). *Menuju ASEAN Economic Community 2015*.Jakarta. [↑](#footnote-ref-20)
21. . C. P. F. Luhulima, *Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015,* Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2011, hal.25. [↑](#footnote-ref-21)
22. . Pembentukan AFTA dalam ASEAN pada saat penandatanganan 1992 belum melibatkan Vietnam, Laos, Kamboja, dan Miyanmar. [↑](#footnote-ref-22)
23. . Bambang Cipto, *Op,. Cit*, Hal.245-246. [↑](#footnote-ref-23)
24. . Yasmin Sungkar,*Pola Integrasi Ekonomi Di Kawasan Asia Timur*, 2009, Jakarta, Departemen Luar Negeri Republik Indnesia , hal. 26 [↑](#footnote-ref-24)
25. . *Mengukur Kesiapan Industri Nasional Jelang AEC 2015,* (Kementerian Perindustrian RI: 2013), pdf, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-25)
26. . *Ibid* [↑](#footnote-ref-26)
27. . *Ibid* [↑](#footnote-ref-27)
28. . Departemen perdagangan Republik Indonesia. *Menuju ASEAN Economic Community*, Tahun 2015.pdf. hal.4 [↑](#footnote-ref-28)
29. .Ibid [↑](#footnote-ref-29)
30. .Ibid [↑](#footnote-ref-30)
31. . Ibid hal 7 [↑](#footnote-ref-31)
32. . Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2009). *Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN* (*ASEAN Economic Community Blueprint*). Jakarta: Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN.

 [↑](#footnote-ref-32)